

## EFEKTIVITAS PENERAPAN STRATEGI PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI REGULASI RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II (RED II) DI UNI EROPA TAHUN 2018-2020

**Dini Tiara Sasmi**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Riau

Email: dinitiarasasmi@soc.uir.ac.id

### Abstract

*This paper examines the effectiveness of the Indonesian Government's strategy in dealing with regulations that limit the consumption of palm oil in Europe called the Renewable Energy Directive II (RED II). This prohibition was followed by a decrease in palm oil exports to Europe which made the Indonesian government try to carry out a countering anti-palm oil campaign (CAPOC) led directly by the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Some of the efforts that have been made include improving downstream sector governance, expanding Indonesia's palm oil exports destination countries besides Europe, such as America, Asia, and Africa, revitalizing and rejuvenating palm oil plantations, conducting intergovernmental diplomacy (G to G) between Indonesia and countries within the European Union, upgrading the B-20 program to B-30 to B-100 and finally CAPOC. The results of the study show that from several strategies carried out by the government, improving downstream sector governance, expanding the scope of Indonesian palm oil exports, and increasing the B-20 program to B-30 are the most effective strategies in dealing with RED II in Europe. This paper uses a qualitative method used secondary data and descriptive analysis techniques in explaining the existing data. This paper aims to describe the effectiveness of the strategies that have been carried out by the Government of Indonesia in dealing with RED II regulations in the European Union.*

**Keywords:** *Effectiveness, Indonesia's Government Strategy, RED II, Palm Oil, Environmental Issue*

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2018 sebuah regulasi baru dikeluarkan oleh komisi Uni Eropa. Regulasi ini bernama *Renewable Energy Directives II* atau RED II, dalam Bahasa Indonesia disebut dengan keputusan Arahan Energi terbarukan II. Regulasi baru ini dapat mengancam keberlangsungan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa, karena dalam peraturan baru tersebut, tercantum kewajiban Negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan RED II paling sedikit 32 persen dari total konsumsi energi negaranya hingga 2020. Permasalahan yang muncul akibat dari peraturan RED II ini adalah, dalam kebijakan tersebut, terdapat aturan yang mengesampingkan atau mengeluarkan penggunaan minyak kelapa

sawit sebagai bahan yang diperbolehkan dalam produksi bahan bakar nabati (biofuel). Regulasi baru ini sangat krusial bagi Indonesia dikarenakan Uni Eropa merupakan destinasi ekspor terbesar kedua bagi minyak kelapa sawit (*crude palm oil/ CPO*) Indonesia dan turunannya.

Dalam menghadapi dampak yang timbul akibat regulasi RED II di Uni Eropa tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa strategi yang diperlukan guna menekan kerugian yang timbul. Strategi tersebut yaitu, perbaikan tata kelola sektor hilir perkebunan sawit, memperluas cakupan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selain Eropa yaitu Amerika, Asia dan Afrika, revitalisasi dan peremajaan perkebunan sawit,

melakukan jalur diplomasi antar pemerintah (G to G) Indonesia dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa, meningkatkan program B-20 menjadi B-30 hingga menjadi B-100 dan terakhir merangkul serta pihak-pihak swasta untuk menerapkan perkebunan kelapa sawit dengan prinsip berkelanjutan.

Mengutip data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), disebutkan bahwa volume ekspor minyak CPO dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton. Pasar ekspor terbesar CPO Indonesia adalah India sebesar 6,7 juta ton. Sedangkan Uni Eropa menempati posisi kedua sebesar 4,7 juta ton. Lalu disusul oleh Cina sebesar 4,4 juta ton, Afrika sebesar 2,5 juta ton, Pakistan sebesar 2,4 juta ton, Timur Tengah sebesar 1,9 juta ton, Bangladesh sebesar 1,4 juta ton, Amerika Serikat sebesar 1,2 juta ton, dan negara lainnya sebesar 6,4 juta ton. Dengan demikian terlihat jelas bagaimana pentingnya Uni Eropa sebagai salah satu destinasi ekspor minyak kelapa sawit bagi Indonesia. (Sitanggang, 2017)

Dalam pasar minyak nabati dunia terdapat berbagai macam jenis sumber minyak nabati seperti, minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak lobak, dan terakhir minyak kelapa sawit. Dari seluruh jenis minyak nabati tersebut, minyak kelapa sawit merupakan yang paling efektif dan efisien untuk diproduksi. Hal ini dikarenakan dalam 1 hektar luas area lahan, perkebunan sawit mampu menghasilkan minyak hingga berkali-kali lipat dibandingkan dengan hasil produksi minyak dari sumber nabati lain. Sebagai contoh, dalam 1 hektar, minyak kedelai hanya mampu produksi hingga 0.4 ton, minyak biji matahari 0.6 ton, minyak biji lobak (rapeseed) 0,7 ton. Sedangkan sawit mampu memproduksi minyak kelapa sawit hingga 4 ton per hektarnya. Produktivitas minyak kelapa sawit unggul 6-10 kali lipat

produktivitas minyak nabati lainnya (Oil World, 2012).

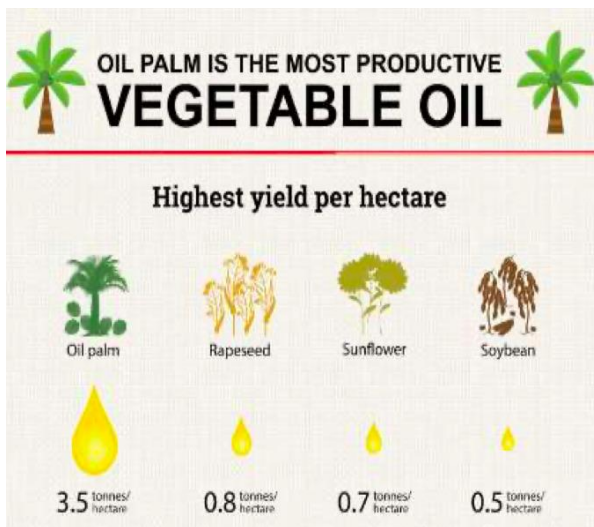
**Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Luas Areal Lahan Dalam Produksi Minyak Nabati Dunia**



Sumber: Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia November 2020

Berdasarkan data dari webinar diplomasi kelapa sawit Indonesia melawan kampanye negatif Uni Eropa yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Dr. Ir. H Musdhalifah Machmud MT pada tanggal 27 November 2020, maka terlihat minyak nabati yang paling banyak menggunakan lahan yaitu minyak kedelai, diikuti minyak biji bunga matahari, minyak rapeseed dan terakhir minyak kelapa sawit. Data ini juga menjelaskan untuk memproduksi 1 ton minyak nabati, kelapa sawit hanya membutuhkan 0,3 ha dibandingkan dengan minyak rapeseed yang membutuhkan 1,3 ha, minyak bunga matahari 1,5 ha dan minyak kedelai yang membutuhkan 2,3 ha lahan untuk dapat memproduksi minyak nabati seberat 1 ton. Data webinar oleh deputi bidang koordinasi pangan dan agribisnis ini telah memperlihatkan dengan jelas bagaimana produktivitas minyak kelapa sawit jauh lebih unggul dibandingkan dengan minyak-minyak nabati lain. Dalam arti kata lain, minyak sawit membutuhkan lahan yang jauh lebih kecil dibandingkan minyak-minyak nabati lain (Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia, 2020).

**Gambar 1. Perbandingan Hasil Produksi Minyak Nabati Dunia**



Sumber: Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia November 2020

Dalam sisi produksi minyak sawit juga unggul dibandingkan minyak nabati lain. Jika dilihat dari produksi minyak nabati dunia tahun 2018 sebagaimana yang disampaikan dalam laporan komisi Eropa pada tahun 2018, maka terlihat bahwa dengan luas lahan paling kecil, kelapa sawit menjadi penghasil minyak paling tinggi. Lebih rinci laporan ini menggambarkan bahwa di tahun 2018 dalam 1 hektar lahan maka produksi kelapa sawit bisa mencapai 3,5 ton, disusul minyak rapeseed sebesar 0.8 ton, minyak biji bunga matahari sebesar 0,7 ton, baru kemudian terakhir diduduki oleh minyak kedelai yang hanya mampu menghasilkan minyak nabati sebesar 0,5 ton dalam 1 hektar lahan (Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia, 2020).

Produktivitas minyak sawit yang lebih tinggi dan biaya produksi minyak sawit yang lebih rendah menyebabkan harga minyak sawit konsisten lebih rendah dibandingkan minyak nabati lainnya. Harga minyak sawit yang lebih murah tersebut dan ketersediaannya di pasar internasional menyebabkan meningkatnya konsumsi minyak sawit dunia. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dan efektif untuk dibudidayakan dan diolah di dunia mengalahkan minyak-minyak nabati lain seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai (Thahar, 2018).

Dalam menghadapi regulasi yang telah merugikan industri perkebunan kelapa sawit ini pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dan langkah. Langkah-langkah tersebut diantaranya perbaikan tata kelola sektor hilir perkebunan sawit, memperluas cakupan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selain Eropa yaitu Amerika, Asia dan Afrika, revitalisasi dan peremajaan perkebunan sawit, melakukan jalur diplomasi antar pemerintah (G to G) Indonesia dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa, meningkatkan program B-20 menjadi B-30 hingga menjadi B-100 dan terakhir merangkul serta pihak-pihak swasta untuk menerapkan perkebunan kelapa sawit dengan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya, peneliti ingin melihat efektifitas dari strategi-strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi regulasi RED II di Uni Eropa tersebut.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Asosiasi Produsen Minyak Sawit Indonesia seperti GAPKI (Gabungan Pengusahaan Kelapa Sawit Indonesia), PT Riset Perkebunan Nusantara, Duta Besar LBBP RI Brussel serta dari berbagai instansi atau asosiasi terkait lainnya.

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dan dideskripsikan menggunakan teknik analisis deskriptif. Rentang tahun yang diambil pada penelitian ini adalah 2 tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Rentang waktu tersebut dipilih oleh peneliti karena implementasi strategi pemerintah Indonesia dimulau dari tahun 2018 tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi penolakan impor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa, pemerintah Indonesia telah memberikan reaksi berupa sikap protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan Indonesia. Kebijakan-kebijakan terkait kelapa sawit di Indonesia ini diantaranya:

1. Uni Eropa menerapkan kebijakan EU Directive II. Kebijakan ini mengatur beberapa hal diantaranya penerapan standar Indirect Land Use Change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan tidak langsung, rencana pembatasan tingkat maksimum kandungan 3-MCPD pada makanan, dan investigasi countervailing duty atau anti subsidi biodiesel (AS 650).

2. Di Perancis, pemerintahannya juga menerapkan beberapa aturan diantaranya, rancangan amandemen regulasi yang mengatur pemberian insentif pajak kepada bahan bakar nabati, artikel mengenai kebijakan 100% sustainable palm oil Carrefour Perancis dan kampanye dengan slogan “*No to palm oil, yes to low prices, but not if it costs the earth.*”

3. Inggris menerapkan beberapa peraturan diantaranya, beberapa supermarket retail di Inggris berhenti menjual produk yang berbahan pokok sawit, Amnesty International (AI) membahas mengenai “*The great palm oil scandal: labour abuses behind big brand name,*” program sertifikasi baru yang menyatakan bebas minyak sawit.

4. Di Belanda, pemerintahannya mengatur agar KLM Royal Dutch Airlines untuk berhenti memasok makanan yang menggunakan bahan minyak sawit.

5. Belgia menerapkan regulasi mengenai pencantuman 0% minyak sawit oleh Delhaize Supermarket.

6. Pemerintahan Norwegia melarang *public procurement* untuk biofuels berbasis minyak kelapa sawit.

7. Parlemen Ukraina mengeluarkan resolusi terkait pelarangan minyak kelapa sawit pada produksi makanan, susu, dan produk susu.

Selanjutnya, menyikapi kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa dan menimbang permasalahan lingkungan yang menerpa industri sawit Indonesia cukup lama, maka upaya solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ada beberapa, berikut ini penjelasannya:

1. Pertama, perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi). Perbaikan tata kelola dan pengembangan sektor hilirisasi sawit berfokus kepada pengembangan sawit dan turunannya.

2. Menambah cakupan negara-negara tujuan ekspor minyak sawit selain Eropa yaitu Asia dan Afrika. Kerja sama antar wilayah dapat mulai dilakukan, selain tentunya terus menumbuhkan penggunaan sawit di dalam negeri.

3. Ketiga, rencananya peremajaan kebun PTPN di lahan seluas 28 ribu ha di lima kabupaten di Provinsi Riau, selama 5 tahun kedepan. Selain peremajaan, hal yang sudah dilakukan yaitu moratorium hutan, dimana regulasi ini tercantum dalam Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 19 September 2018.

4. Keempat, meningkatkan reputasi positif akan industri minyak kelapa sawit melalui jalur diplomasi langsung oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara Uni Eropa (G to G).

5. Kelima, meningkatkan program biodiesel dengan menggunakan campuran minyak nabai dari CPO yang semula sebesar 20 persen (B-20) menjadi 30 persen (B-30).

6. Keenam, meningkatkan penelitian-penelitian berbasis industri sawit yang berfokus kepada manfaat dan keunggulannya, sambil merangkul seluruh komponen masyarakat baik yang berhubungan langsung dengan industri sawit maupun tidak (Sasmi, D. T. (2019).

Selanjutnya, mengingat perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan prima yang telah memberikan banyak pemasukan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, maka sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh dalam menangani isu-isu yang berkembang seputar minyak kelapa sawit. Pemerintah perlu bekerja sama dengan seluruh stake-holder mulai dari pelaku industri dan pusat-pusat kajian penelitian perkebunan sawit untuk menemukan solusi terbaik bagi pemecahan masalah yang menimpa perkebunan kelapa sawit.

Langkah-langkah penyelesaian masalah yang diambil harus menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat Indonesia. Jadi, langkah-langkah yang diambil tidak hanya memberikan dampak yang baik kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia, namun juga memberikan dampak yang baik bagi kelestarian lingkungan Indonesia. Walaupun, keinginan manusia untuk melestarikan keasrian lingkungan seringkali tidak sejalan dengan pertumbuhan perekonomian, namun jalan tengah selalu ada dan bisa dijadikan alternatif. Melihat kepada negara tetangga

terdekat Indonesia yaitu Singapura yang walaupun luas negaranya tidak lebih besar dari pulau samosir di Danau Toba Sumatera Utara, namun mereka tetap sukses menjalankan konsep green city dan environmentally friendly dalam segala aspek pemerintahannya dan tetap mendapatkan laju pertumbuhan perekonomian yang sangat baik.

### **Efektivitas Penerapan Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Regulasi Renewable Energy Directive II di Uni Eropa**

Penerapan strategi pemerintahan Indonesia berkaitan dengan kampanye isu kelapa sawit Indonesia di Eropa bisa dikatakan baru dilaksanakan selama 3 tahun belakangan. Sehingga hasil yang dirasakan belum terlalu signifikan, namun dari beberapa strategi yang telah diterapkan ada beberapa yang telah menunjukkan kecenderungan positif terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia. Pertumbuhan ini terlihat tidak hanya dalam segi ekspor namun juga keuntungan yang diperoleh dari penyerapan minyak kelapa sawit di dalam negeri.

Strategi pertama pemerintah Indonesia, perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi), perbaikan tata kelola dan pengembangan sektor hilirisasi sawit barangkali merupakan strategi yang paling efektif. Tidak hanya karena strategi ini memberikan efek langsung dalam penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri, namun juga strategi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi industri kelapa sawit Indonesia. Memperbaiki tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi) terbukti sebagai strategi yang paling efektif dikarenakan potensi maksimalisasi produksi minyak kelapa sawit Indonesia masih sangat terbuka lebar.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ketika dibandingkan dengan Malaysia maka dalam hal pengembangan sawit

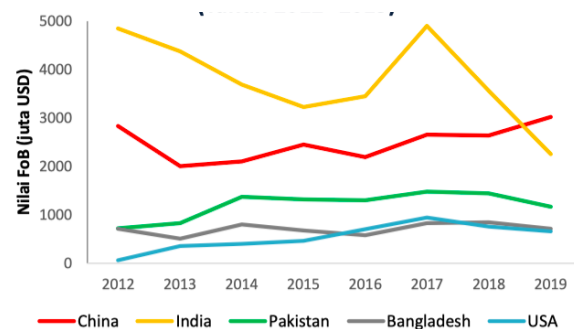


dan turunannya, maka hingga saat ini Indonesia baru dapat mengembangkan 40 jenis produk turunan CPO sedangkan Malaysia telah berhasil mengembangkan 100 jenis turunan produk CPO. Dengan demikian, potensi industri perkebunan kelapa sawit Indonesia untuk mengembangkan industri hilir sangat besar dan lebih dibutuhkan. Ditambah lagi, berfokus pada ekspansi lahan dengan jalan deforestasi berisiko meningkatkan konflik dan kerusakan lingkungan hidup perkebunan sawit. Pembukaan lahan baru ini dapat berimbas buruk terhadap kerusakan lingkungan yang kemudian juga dapat merusak reputasi minyak sawit Indonesia di mata pasar minyak nabati dunia. Selain itu, perlu juga diwaspadai kelebihan produksi (*over supply*) pada minyak nabati dunia, termasuk kepada minyak kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir. Ekspansi lahan perkebunan yang massif dan kurang tertibnya para produsen dalam mematuhi ketentuan/regulasi tata kelola yang telah ditetapkan oleh pemegang kebijakan menjadi salah satu faktor *over supply* ini.

Beberapa Lembaga pusat pengkajian kelapa sawit Indonesia, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Greenomics Indonesia dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menyoroti fenomena *over supply* ini. Sebagai contoh, hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat Greenomics pada tahun 2018 menunjukkan total perluasan lahan perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 14,03 juta hektar. Selanjutnya, BPPT memperkirakan produksi sawit Indonesia akan mencapai 51,7 juta ton pada tahun 2025. Jika kelebihan produksi ini terus berlanjut tanpa diiringi perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi), maka dapat diperkirakan di tahun-tahun mendatang harga jual produksi sawit dan turunannya akan terus menurun.

Strategi kedua dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi regulasi Renewable Energy II di Eropa adalah memperluas cakupan pasar ekspor sawit selain Eropa yaitu Asia dan Afrika. Strategi ini juga terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan seperti *over supply* yang terjadi akibat dari pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit 10 tahun belakangan di Indonesia. Seperti yang telah diketahui dari penelitian-penelitian sebelumnya negara-negara Uni Eropa yang pada awalnya merupakan destinasi terbesar bagi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia secara perlahan dan pasti membatasi bahkan melarang impor minyak kelapa sawit dari Indonesia dikarenakan isu lingkungan.

Tabel 2. 5 (Lima) Besar Negara Tujuan Ekspor Minyak Sawit (2012-2019)



Sumber: BPS (2020), diolah

Tabel diatas menjelaskan bagaimana kecenderungan ekspor Indonesia ke-5 negara teratas yang menjadi tujuan ekspor minyak sawit. Dari tahun 2012 hingga tahun 2019 ekspor minyak sawit Indonesia cenderung stagnan ke Pakistan, Bangladesh dan Amerika Serikat. Namun ekspor ke Cina dan India cenderung meningkat. Meskipun akibat Kerjasama bilateral antara India dan Malaysia di tahun 2017 menyebabkan penurunan drastis ekspor minyak sawit Indonesia ke India, hal ini masih bisa diartikan bahwa Indonesia telah berhasil menambah negara tujuan baru dari ekspor minyak kelapa sawit yang sebelumnya terfokus ke Uni Eropa ke negara-negara baru

di Asia seperti India dan Cina. Ekspor minyak sawit Indonesia ke Cina juga terus mengalami peningkatan. Selanjutnya untuk meningkatkan volume dan ke negara tujuan ekspor, promosi juga perlu dilakukan dengan menambahkan negara-negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit yang baru seperti negara-negara di Afrika dan Amerika Latin.

Strategi ketiga pemerintah Indonesia yakni, berkaitan dengan aspek lingkungan, rencana lima tahun ke depan peremajaan PTPN V di lahan seluas 28 ribu ha di lima kabupaten di Provinsi Riau, dan keempat, meningkatkan reputasi positif akan industri minyak kelapa sawit, barangkali merupakan strategi yang belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat strategi ketiga belum berjalan lima tahun dan strategi keempat membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk meningkatkan reputasi positif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, mulai dari pendisiplinan produksi sawit Indonesia sesuai standar ISPO, proses tata kelola yang terencana dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berkelanjutan, diplomasi kelapa sawit Indonesia di Eropa berupa perundingan WTO, countering anti palm oil campaign (CAPOC) yang dipimpin oleh kementerian luar negeri, advokasi aktif oleh *council of palm oil producing countries* (CPOPC), hingga *positive campaign* dengan jalan memperbanyak pusat kajian dan publikasi penelitian yang menunjukkan manfaat dan keunggulan dari minyak kelapa sawit Indonesia.

Strategi kelima yakni, rencana program biodiesel seperti B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100 juga terbukti efektif dalam upaya pemerintahan Indonesia menghadapi Renewable Energy Directive II di Eropa. Hal ini dikarenakan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri akan berpengaruh positif

terhadap kestabilan harga minyak kelapa sawit. Indonesia yang merupakan negara terbesar sebagai produsen minyak kelapa sawit dunia memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan harga CPO dunia. Program mandatori biodiesel pemerintah Indonesia, menjadi salah satu instrument stabilisasi harga CPO karena setiap pengurangan 1 juta ton stok CPO, akan menaikkan harga CPO USD96/ton.

Tabel 3. Pergerakan Harga CPO Dunia dan Indonesia



Sumber: Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia November 2020

Apabila kita melihat kepada tabel 3 diatas maka dapat terlihat ada kecenderungan peningkatan harga CPO dunia dan Indonesia di periode oktober 2019 hingga Februari 2020. Pada Februari 2020, harga CPO dunia dan Indonesia mengalami penurunan tajam menyusul terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Namun mulai bulan Mei 2020 hingga September 2020 harga CPO mulai merangkak naik kembali. Peningkatan harga CPO pada dua periode tersebut tidak terlepas dari salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan CPO pada Biodiesel dimulai dari B-20, B-30 hingga B-100. Strategi ini diwujudkan dengan program mandatori biodiesel yang sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%.

Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan kadar biodiesel hingga 20% (B20). Program Mandatori B20 berjalan baik dengan pemberian insentif dari BPDPKS untuk sektor PSO. Dan mulai 1 September 2018 pemberian insentif diperluas ke sektor non-PSO.

Gambar 2. Implementasi Program Mandatori Biodiesel B-30

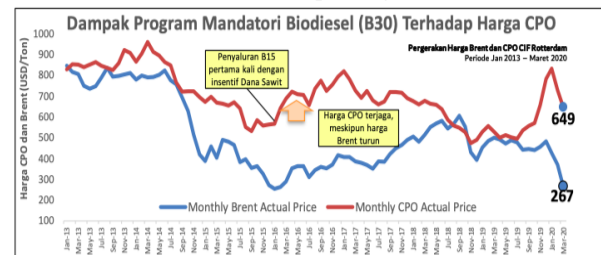


Sumber: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang diakses melalui <https://ebtke.esdm.go.id>

Peningkatan penggunaan CPO sebagai bahan dasar biodiesel telah memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan hasil produksi CPO dalam negeri. Hal ini tentu akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan harga CPO Indonesia. Gambar 2 memberikan informasi bagaimana pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang dikeluarkan tahun 2008 mulai menggunakan CPO sebagai bahan campuran bahan bakar sebesar 2,5% hingga 7,5%. Penggunaan CPO sebagai bahan bakar nabati ini kemudian perlahan ditingkatkan menjadi 10% di tahun 2014, 15% di tahun 2015, mandatori B20 di tahun 2016 dengan implementasi mandatori pencampuran B20 untuk sektor PSO melalui insentif dan Non-PSO diberlakukan tanpa insentif. Pada tahun 2018, perluasan insentif biodiesel ke Non-PSO dilakukan dengan memberlakukan pada railtest KAI. Pada tahun yang sama juga disusun rencana spek B100 untuk pengujian B30. Selanjutnya biodiesel dengan campuran minyak kelapa sawit sebesar 30%

mulai diberlakukan di bulan Januari 2020 (EBTKE, 2019).

Tabel 3. Dampak Program Mandatori Biodiesel (B30) Terhadap harga CPO



Sumber: Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia November 2020

Tabel 3 memberikan informasi terkait peningkatan harga CPO Indonesia disusul mandatori biodiesel B30. Mandatori ini sendiri dimulai dengan B15 di bulan Januari 2016 yang kemudian diikuti peningkatan tajam harga CPO yang semula berada di harga 200 usd/ton untuk monthly brent actual price dan 600 usd/ton untuk monthly CPO actual price meningkat menjadi 350 usd/ton dan 800 usd/ton. Ini artinya strategi pemerintah Indonesia untuk menaikkan penyerapan CPO dalam negeri dengan peningkatan kadar CPO sebagai minyak nabati pada biodiesel terbukti efektif dalam menghadapi regulasi renewable energy directive II di Eropa. Selain itu, penggunaan CPO sebagai bahan dasar biodiesel juga berdampak positif terhadap penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan mengingat energi berbahan bakar fosil sudah semakin langka dan diprediksi akan segera habis.

Strategi pemerintah yang keenam, yakni meningkatkan jumlah penelitian-penelitian terkait industri sawit yang berfokus kepada manfaat dan keunggulannya barangkali belum dapat dikatakan efektif namun merupakan rencana jangka panjang yang akan memberikan dampak paling efektif terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia. Reputasi merupakan hal yang esensial dalam setiap perdagangan komoditi internasional. Hal ini menjadi penting karena dewasa ini isu



lingkungan dan keberlanjutan menjadi isu penting dan tidak terlekkkan lagi. Isu lingkungan bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi politik internasional. Bahkan dalam program PBB yang sedang gencar dipromosikan yakni SDGs (*Sustainable Development Goals*), dari 17 pilar tujuan keberlanjutan, terdapat 8 pilar yang membahas isu lingkungan ini. Sehingga menjadi hal yang sangat penting untuk terus menjaga reputasi positif minyak kelapa sawit, dan lebih penting lagi untuk menjaga produksi kelapa sawit sesuai dengan standar ISPO yang telah ditetapkan.

## SIMPULAN

Dalam menghadapi ini kampanye anti minyak kelapa sawit di Eropa, pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya diantaranya perbaikan tata kelola sektor hilir perkebunan sawit, memperluas cakupan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selain Eropa yaitu Amerika, Asia dan Afrika, revitalisasi dan peremajaan perkebunan sawit, melakukan jalur diplomasi antar pemerintah (G to G) Indonesia dengan negara- negara yang ada di Uni Eropa, meningkatkan program B-20 menjadi B-30 hingga menjadi B-100 dan terakhir merangkul serta pihak-pihak swasta untuk menerapkan perkebunan kelapa sawit dengan prinsip berkelanjutan.

Dari beberapa strategi yang telah dijalankan pemerintah Indonesia, perbaikan tata kelola dan sektor hilir (hilirisasi), memperluas cakupan pasar ekspor sawit selain Eropa yaitu Asia dan Afrika, rencana program biodiesel seperti B-20, B-30 serta tujuan akhir B-100 merupakan strategi yang paling efektif. Perbaikan tata kelola dan hilirisasi berdampak langsung terhadap maksimalisasi produksi sawit. Perluasan cakupan pasar ekspor sawit berdampak langsung terhadap stabilitas volume ekspor CPO Indonesia, sehingga

kerugian akibat penurunan volume ekspor CPO ke Eropa bisa tersubstitusi. Terakhir rencana program biodiesel B-30 hingga B-100 berdampak langsung terhadap penyerapan *over-supply* produksi sawit dalam negeri yang kemudian memberikan pengaruh positif terhadap harga CPO Indonesia. Selanjutnya, strategi lain seperti rencana lima tahun peremajaan perkebunan sawit nusantara, dan countering anti-palm oil campaign (CAPOC) juga merupakan upaya yang baik hanya saja membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk merasakan hasilnya sehingga masih kurang efektif dibandingkan strategi lain dalam kurun waktu yang singkat.

Sawit merupakan komoditas yang memiliki berbagai manfaat bagi Indonesia. Upaya serius dan komprehensif sangat diperlukan untuk meningkatkan harga jual CPO, sembari terus menjalankan strategi jangka panjang yakni pemulihan reputasi minyak kelapa sawit. Selanjutnya, penelitian-penelitian terkait isu lingkungan dan minyak kelapa sawit perlu terus dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan berupa kurun waktu yang masih terbilang singkat sehingga penelitian lanjutan ditahun mendatang sangat dibutuhkan untuk melihat hasil secara lengkap untuk kemudian dapat dievaluasi dan dijadikan bahan proyeksi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan sejenis agar industri minyak kelapa sawit Indonesia semakin baik tidak hanya pada factor ekonomi namun juga pada faktor keberlanjutan lingkungan.

Dalam masa pemerintahan Taliban di tahun 1994, pemerintah Afghanistan diubah menjadi Emirat/Imarah Islam Afghanistan, pada saat itu juga banyak terjadi kekerasan sosial terhadap masyarakat Afghanistan dan dicabutnya hak-hak perempuan. Setelah berhasil menaklukkan Afghanistan, Taliban secara langsung merubah peraturan-

peraturannya dengan dasar syariah Islam yang lebih ketat. Kaum perempuan yang sebelumnya memiliki pekerjaan yang sangat layak seketika mereka diharuskan untuk berhenti bekerja, sehingga mereka menjadi pengemis demi menafkahi keluarganya.

Kekuasaan Taliban yang represif membuat masyarakat Afghanistan resah dan amat tidak menyukai pemerintahan saat itu serta dunia internasional pun mengecam kebijakan-kebijakannya yang sangat melanggar hak asasi manusia dan mendiskriminasi kaum perempuan. Taliban yang asalnya dari wilayah Pashtun memiliki banyak pendukung karena sebagian besar warga Afghanistan adalah suku Pashtun dan dalam kebudayaan Pashtun sendiri ruang gerak perempuan sangat dibatasi sesuai dengan aturannya, juga pendidikan bagi perempuan dianggap sangat tidak penting sehingga banyak keluarga yang melarang anak perempuannya untuk bersekolah dan mereka dibuat hanya untuk menghabiskan waktunya didalam rumah saja, oleh sebab ini lah perempuan seringkali mengalami tindakan diskriminasi dalam masa pemerintahan Taliban walaupun memang telah sejak lama diskriminasi terhadap perempuan terjadi.

Selain itu, gerakan nasionalis yang berpegang teguh dengan Islam Sunni ini mayoritas populasinya berada di daerah timur dan selatan Afghanistan, sehingga Taliban menerapkan kebijakan Islam Sunni itu sendiri secara keras. Di tahun 1996, situasi kemanusiaan semakin kacau karena kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat Afghanistan semakin meningkat, dalam hal ini Taliban melanggar ataupun merebut hak asasi masyarakat Afghanistan yang secara sistematis membuat masyarakat semakin terdiskriminasi dan terpinggirkan.

Semakin dikecamnya Taliban oleh negara-negara dunia akibat mengancam

keamanan manusia membuat Afghanistan semakin banyak yang memberikan dukungan dan bantuan atas situasi tersebut. Di akhir tahun 1990-an, gerakan Taliban telah membantu salah tersangka dari peristiwa 911 yang amat dikejar oleh Amerika Serikat, yang pada akhirnya kekuasaan Taliban di Afghanistan digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001 akibat dari memberikan perlindungan terhadap Osama bin Laden.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arbiyah, N., Nurwianti, F., & Oriza, D. (2008). Hubungan bersyukur dengan *subjective well being* pada penduduk miskin. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14 (1), 1124.
- Adang Agustian, Projogo. 2008. "Analisis Dinamika Ekspor Dan Keunggulan Komparatif Minyak Kelapa Sawit (CPO) Di Indonesia." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor (1): 1–24.
- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan PT Riset Perkebunan Nusantara. (2019). *Kajian Terhadap Renewable Energy Directive Serta Perumusan Posisi Indonesia terhadap Kebijakan Tersebut*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- CNBC. (2019). RI Bakal Rugi Miliaran Dolar Akibat Larangan Sawit Uni Eropa.
- Erman, Erwiza. 2017. "Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa \*." : 1–13.
- Ewaldo, Ega. 2002. "Analisis Ekspor Minyak Kelapa Sawit." *e-Jurnal Perdagangan, Industri dan Moneter* 3(1): 10–15.
- GAPKI. (2018). 16 Juta Pekerja Gantungan Hidupnya Pada Industri Sawit. Retrieved from <https://gapki.id/news/4857/16-juta-pekerja-gantungan-hidupnya-pada-industri-sawit>.

- Hadi, Andri (Duta Besar LBBP RI Brussel). 2020. "Kebijakan Uni Eropa dan Kampanye Negatif Terhadap Produk Kelapa Sawit Indonesia. Disampaikan dalam Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia Melawan Kampanye Negatif Uni Eropa pada November 2020.
- Hagi, Syaiful Hadi, and Ermi Tety. 2012. "Analisis Strategi Indonesia Untuk Meningkatkan Akses Pasar Produk Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Amerika Serikat." *Pekbis Jurnal* 4(3): 180–91.
- Hagi, Syaiful Hadi, dan Ermi Tety. 2012. "Analisis Daya Saing Ekspor Minyak Sawit Indonesia Dan Malaysia Di Pasar Internasional." *Pekbis Jurnal* 4 No 3(180–191).
- Humas EBTKE. 2019. Program Mandatori Biodiesel 30% (B30). Diakses dari <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30> pada tanggal 13 April 2020.
- Indra Nugraha dan Sapariah Saturi. (2019). Tak Perlu Sewot Kebijakan Uni Eropa, Serius Saja Benahi Tata Kelola dan Hilirisasi Sawit. Retrieved from <https://www.mongabay.co.id/2019/03/23/tak-perlu-sewot-kebijakan-uni-eropa-serius-saja-benahi-tata-kelola-dan-hilirisasi-sawit/>
- Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri. (2020). "Kajian dan Strategi Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia." Disampaikan dalam Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia Melawan Kampanye Negatif Uni Eropa oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada November 2020.
- K.J. Holsti. (2005). *Theories of International Relations Decisions-Making*. London: Duke University.
- KJ Holsti. (1988). *Politik internasional, Jilid 2: Kerangka Untuk Analisis* (2nd ed.; M. T. Azhary, ed.). Jakarta: Erlangga.
- Laksono, Herry, et al. (2019). "Peran Diplomasi dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati." Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia.
- Machmud, Musdhalifah. (2020). Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan Bagi Perkebunan Kelapa Sawit Nasional. Disampaikan pada Webinar Diplomasi Kelapa Sawit Indonesia oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis pada bulan November 2020.
- Mangeswuri, D. R. (2019). Hambatan ekspor minyak sawit ke uni eropa dan upaya mengatasinya 19. Berkas DPR RI. Retrieved from [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XI-8-II-P3DI-April-2019-220.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-8-II-P3DI-April-2019-220.pdf)
- Oil World. (2012). *Global Supply Demand and Price Outlook of Poils and Fats*. Global Oils & Forum of the APOC. New Orleans (USA).
- Prasetyo, Agung, and Sri Marwanti. 2017. "Comparative Advantage and Export Performance of Indonesian Crude Palm Oil in International Markets." *Jurnal Agro Ekonomi* 35(2): 89–103.
- Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional. 2015. "Analisis Strategi Indonesia Untuk Meningkatkan Akses Pasar Produk Crude Palm Oil (CPO) Indonesia Ke Amerika Serikat." *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia* 4 No 3(180–191): 56.
- Putri, Marsha Dewi. 2013. "Analisis Dampak Black Campaign Minyak Kelapa Sawit (CPO) Terhadap Volume Ekspor Cpo Indonesia."
- Ricardo, David. (2011). *On The Principles of Political Economy and Taxation*. London: Jhon Murray.
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional Edisi Kelima* (5th ed.; H. Munanda, ed.). Jakarta: Erlangga.

- Salvatore, D. (2012). *International Economics* 12th edition. USA: Wiley and Sons Inc.
- Sasmi, D. T. (2019). INDONESIA GOVERNMENT'S EFFORT TO FACE EU DIRECTIVE REGULATION CONCERNING PALM OIL IN EUROPE. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 1(2), 262-284.
- Sitanggang, T. (2017). *Siaran Pers GAPKI; Refleksi Industri Kelapa Sawit 2017 dan Prospek 2018*. Sekretaris Jenderal GAPKI. Retrieved from <https://gapki.id/news/4140/refleksi-industri-kelapa-sawit-2017-dan-prospek-2018%0D>
- Suherno Gunawan. 2018. "Indonesia Bekerjasama Dengan Malaysia Dalam Membentuk The Council Of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)." *JOM FISIP* 5: 10–17.
- Thahar, A. (2018). *Pasar Minyak Nabati*. BPD. Retrieved from <https://www.bpd.or.id/id/sawit-berkelanjutan/pasar-minyak-nabati-dunia/>
- Ulfa Aulia, Risnayanti, . Harianto, and Tanti Novianti. 2019. "Comparation of Market Position between Indonesia and Malaysia in the Refined Palm Oil (RPO's) Market United States of Ammerica." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 24(1): 48–57.
- Ulfa Aulia, Risnayanti. 2019. "Analisis Posisi Pasar Indonesia Pada Pasar Refined Palm Oil (RPO) Di Negara Importir." *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit* 27(1):1–12.
- USDA, F. (2018). *Oilseeds: World Markets and Trade*. Retrieved from <https://www.fas.usda.gov/data/oilseeds-world-markets-and-trade>
- Yuhendra, Alfis. 2017. "Analisis Determinan Dan Daya Saing Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Di Pasar Dunia." *Indonesian Journal of Agricultural Economics (IJAE)* No 1 8(ISSN 2087-409X): 47–61.